

Bahasa Waria Sebagai Identitas Budaya Subkultur

Oleh: Ayu Nurani Fauzah

Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

an.fauzah@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan bahasa melalui praktik diskursif mampu membentuk identitas waria sebagai subkultur. Teori yang digunakan adalah analisis wacana kritis Michel Foucault. Dalam konteks ini mengungkap adanya relasi pengetahuan-kekuasaan melalui penggunaan bahasa dalam wacana waria di komunitasnya, yang kemudian mengkonvensi identitas waria sebagai gender ketiga (*the third gender*). Diskursus waria sebagai gender ketiga teridentifikasi oleh praktik diskursif berupa penamaan dan sapaan, perubahan bentuk tubuh, cara berperilaku, cara berdandan, serta bidang pekerjaan yang waria tekuni. Praktik diskursif tersebut bertujuan sebagai sarana pemuasan hasrat yang terdapat dalam diri waria sebagai manusia, yakni untuk memperoleh haknya sebagai manusia, memperoleh kesenangan (*pleasure*), dan kebenaran tentang diri. Semua batasan diskursif waria direpresentasikan dalam bahasa waria yang berperan penting sebagai bahasa komunitas (*speech community*), dan menjadi salah satu simbol yang menunjukkan identitas waria sebagai subkultur, dimana waria mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda atau khas dari kebudayaan arus utama masyarakat.

Kata kunci: Waria, Identitas, Subkultur, Wacana Atau Diskursus.

The article aims to find out how language uses throughout practical discursive can create an identity of *Waria* (transgender) as a subculture. The theory used in this paper is Foucault's critical discourse analysis which reveals the relation between knowledge and power throughout language use in discourse of *Waria* community that converts *waria's* identity as the third gender. The discourse of *Waria* as the third gender is identified by discursive practices such as naming and greetings, body shape changes, behavior, fashion, and professions. Those discursive practices are aimed to mean self-satisfaction of *waria* as human being. That means to gain rights as human, pleasure, and truth about their selves. Those *waria's* discursive limits are represented in the important role of *waria's* language as speech community, and being a symbol that signifies *waria's* identity as subculture which means that *warias* have their own cultures which is different from common community's cultures.

Keywords: *Waria* (transgender), Identity, Subculture, Discourse.

PENDAHULUAN

Dalam konteks seksualitas masyarakat Indonesia masih beranggapan identitas manusia secara alamiah atau natural hanya ada dua, perempuan dan laki-laki (*binary thinking*), dimana terbentuk karena kesesuaian atau koherensi alamiah antara seks, gender, dan orientasi seksualnya. Anggapan tersebut menjadi ideologi atau paham konsep bersistem yang dijadikan asas untuk kelangsungan hidup masyarakat atau disebut dengan heteronormavitas demi fungsi menghasilkan keturunan (prokreasi) (Alimi, 2004: XX).

Pelembagaan atau internalisasi *binary thinking* dan heteronormatif sebagai kebenaran dilakukan melalui praktik diskursif oleh pranata-pranata yang mempunyai otoritas di masyarakat, seperti misalnya agama melalui tafsir kitab sucinya, pemerintah melalui Undang-undangnya (UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan), dan pernyataan-pernyataan pejabat negara di media massa.

Jika kemudian terdapat realitas adanya individu atau kelompok sosial yang tidak bisa menyesuaikan dengan

konstruk nilai-nilai *binary thinking* dan heteronormatif yang sudah mapan, seperti halnya individu dalam kelompok LGBTIQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks, dan *queer*), maka sebagai konsekuensinya mereka dianggap sebagai orang atau kelompok “berbeda”, pendosa, dan dilaknat (Nadia, 2005: 156). Dalam masyarakat kemudian timbul rasa ketakutan dan kebencian terhadap homoseksualitas (*homophobia*) yang ditunjukkan dengan sikap mendiskriminasi, memberi tekanan atau represi, serta *bullying* baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap mereka.

Beberapa contoh represi tersebut antara lain berupa kebijakan menggunakan seragam sekolah sesuai dengan gendernya, kebijakan mengisi kolom jenis kelamin atau gender di KTP atau dokumen administrasi lainnya dimana pilihan yang tertera hanya ada wanita dan pria, diskriminasi pembatasan waria untuk mengakses wilayah tertentu seperti jenis pekerjaan, pemukiman, fasilitas umum atau ruang publik (toilet umum dan tempat ibadah), serta lain sebagainya (Widayanti, 2009: 24-25).

Meskipun demikian, pada kenyataannya praktik perilaku homoseksual sudah ada dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia sejak dulu seperti Indok Jawi di Minangkabau, Mairilian di Pondok Pesantren Jawa Timur, Warok dan Gemblak di Ponorogo, Bissu di Sulawesi, dan masih banyak lainnya (Oetomo, 2001: 30-35).

Ketimpangan pemahaman masyarakat atas realitas keberagaman seksualitas yang cair tidak bisa dipungkiri karena produksi praktik diskursif heteronormatif dan *binary thinking* yang mengantarkan *homophobia* dilakukan berulang dalam masyarakat. Tujuannya untuk meregulasi dan memapankan wacana tersebut sebagai suatu kebenaran. Sebagai contoh sejarah mencatat peristiwa yang disebut *zadenschandaal* antara tahun 1938-1939. Insiden ini berawal dari sebuah penangkapan pejabat kolonial yang didakwa berhubungan seksual dengan sesama pria yang mana kemudian terjadi perburuan dan penangkapan orang-orang yang diduga terlibat praktik homoseksual. Peristiwa

tersebut disikapi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan melakukan sebuah operasi rahasia. Sementara itu koran-koran pada saat itu memberitakan penangkapan kaum homoseksual tersebut sebagai perilaku seksual menyimpang yang melawan hukum (Ali, 2016: 845).

Jika melihat pada masa sekarang, pola serupa dimana media massa ikut mereproduksi diskursus heteronormatif masih terulang. Sebagaimana kita lihat pada awal tahun 2016 yang lalu, praktik diskursif penolakan atas keberadaan LGBTIQ melalui pernyataan-pernyataan pejabat negara marak tersebar di media massa.

Seksualitas dalam wacana relasi heteronormatif dan pemikiran biner perempuan-pria memberikan kontribusi dalam terbentuknya identitas waria yang termasuk dalam kelompok LGBTIQ. Sebagai subjek waria adalah sebuah konstruksi diskursif dan atau produk yang lahir dari relasi kekuasaan dan pengetahuan yang terletak pada ruang lingkup sosial antara waria dan masyarakat, yang mana diskursus mengatur apa yang dapat dikatakan

tentang subjek dan dianggap sebagai kebenaran. Dalam kondisi demikian, pengetahuan tidak bersumber pada subjek, tetapi dalam hubungan-hubungan kekuasaan melalui pemahaman masyarakat atas seksualitas (Handayani, 2016: 973). Oleh karenanya, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan bahasa melalui praktik diskursif dalam proses pembentukan identitas waria sebagai subkultur, serta peran bahasa waria dalam membentuk identitas budaya subkultur waria Yogyakarta.

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Bahasa dalam Pembentukan Identitas Waria sebagai Subkultur

Michel Foucault (seks dan kekuasaan-sejarah seksualitas: 2000), mengatakan bahwa seksualitas selalu merupakan hasil konstruksi sosial tertentu, oleh karena itu seksualitas baik secara biologis dan psikologis tidak bisa didefinisikan sebagai suatu yang pasti dan tetap. Lebih jauh Foucault menyatakan bahwa diskursus seksualitas yang membentuk makna subjek dapat

ditemukan dan atau direpresentasikan bahasa.

Makna subjek yang direpresentasi melalui bahasa terbentuk melalui hubungan atau relasi timbal balik pengetahuan dan kekuasaan dalam suatu wacana atau diskursus. Ketika manusia terlahir atau dikatakan sebagai subjek di mana-mana, sejatinya subjek tersebut adalah objek melalui relasi kekuasaan-pengetahuan. Dan kekuasaan yang dimaksud Foucault di sini bukanlah suatu kepemilikan atau represi orang yang mempunyai kuasa atau wewenang. Melainkan sesuatu yang produktif atau menghasilkan melalui praktik dalam suatu ruang lingkup dalam banyak posisi yang strategis berkaitan satu sama lain, yakni tersusun, teratur dalam hubungan manusia. Lebih jauh menurut Foucault penyelenggaraan kekuasaan terus menerus akan disusun, dimapankan, dan diwujudkan melalui pengetahuan dan wacana, begitu pun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek

kekuasaan. Karenanya kebenaran bukanlah sesuatu yang terberi, natural atau datang dari langit, melainkan ia dihasilkan dari efek kekuasaan yang menggiring khalayak untuk mengakuinya (dalam Eriyanto, 2011: 65-66).

Kondisi waria di Yogyakarta yang direpresentasikan masyarakat sebagai entitas subjek yang menyimpang atau marginal merupakan hasil dari relasi pengetahuan-kekuasaan dalam konteks seksualitas diskursus heteronormatif serta *binary thinking* sebagai suatu kebenaran yang mapan di masyarakat. Hal tersebut di susun, diwujudkan, dan dimapankan melalui pengetahuan dalam wacana yang diproduksi dan didelimitasi atau dibatasi oleh lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas di masyarakat seperti: (1) agama, misal dalam Islam ialah berupa tafsir Al-Qur'an Surat As Syura ayat 11 dan Fathir ayat 11 mengenai penciptaan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk melahirkan keturunan, serta surat An-Naml ayat 54-55 dan Al-A'raf

ayat 80-81 mengenai kisah kaum Nabi Luth yang berperilaku homoseksual (*liwath* atau aktivitas seks anal) mendapatkan laknat dan hukuman dari Tuhan, (2) negara, yakni berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dibuat pada masa pemerintahan Orde Baru tentang dasar perkawinan Bab I pasal 1 yang berisi aturan pernikahan sah dalam hukum negara ialah pernikahan yang dilakukan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Alimi, 2004: XXI), dan tindakan pemerintah yang kerap merazia waria, dimana hal tersebut membentuk citra waria sebagai individu berperilaku amoral sehingga harus diminimalisir aktifitasnya dengan cara dirazia untuk kemudian diberikan pendampingan lebih lanjut (Widayanti, 2009: 53), (3) ilmu pengetahuan (Psikologi & Biologi) berupa statemen bahwa homoseksual atau menjadi waria

adalah karena adanya kelainan psikis dan kelain kromosom serta hormon dalam tubuh.

Di lain sisi dalam kacamata waria atau yang kerap disebut dengan *bencong*, *wandu* (*wadon dudu*-Jawa), *mukhannast* (Arab), *calabai* (Sulawesi-Sumatra), *wadam* (wanita-adam) terbentuk Identitas budaya subkultur waria dari relasi pengetahuan-kekuasaan melalui penggunaan bahasa. Yakni dalam diskursus waria yang jati dirinya dipahami dan dikonvensi sebagai gender ketiga di Indonesia (*the third gender*), dimana direpresentasikan melalui gagasan atau konsep diri waria yang identitas seksnya laki-laki namun gendernya perempuan, orientasi seksual dan atau percintaannya yang homoseksual (sesama jenis kelamin), sektor pekerjaan yang waria tempati (pekerja seks komersial di *cebongan*, pengamen di jalanan, dunia hiburan malam, *fashion* dan kecantikan), praktik penamaan dan sapaan yang berupa nama atau sapaan bersifat feminin sesuai dengan gender perempuan, perubahan bentuk tubuh, cara

berperilaku, cara berdandan yang mengimitasi konsep cantik dan atau feminitas perempuan. Praktik-praktik diskursif demikian bertujuan sebagai sarana pemuasan hasrat yang terdapat dalam diri waria sebagai manusia, yakni untuk memperoleh haknya sebagai manusia, untuk memperoleh kesenangan, dan kebenaran tentang diri (Respa, 2014: 109-110). Adapun bahasa slang yang waria gunakan sebagai bahasa komunitas (*speech community*) menyatukan sekaligus merepresentasikan batasan-batasan praktik diskursif tersebut sebagai salah sebuah simbol identitas subkultur waria yang tidak bisa berdiri sendiri atau berhubungan satu sama lain dengan praktik diskursus lainnya di tengah konteks ruang, dan waktu tertentu dalam masyarakat.

B. Penggunaan dan Peran Bahasa Waria dalam Pembentukan Identitas Budaya Subkultur Waria

Waria berdasar seksualitas masuk dalam kategori transgender, yangmana bisa kita identifikasikan sebagai seseorang yang memiliki

seks atau jenis kelamin (*Biological Sex*) pria, berorientasi seksual sesama jenis kelamin atau homoseksual, beridentitas gender feminin, serta cenderung mengekspresikan gendernya feminin atau dengan kata lain dalam hal ini ekspresi gender waria adalah *non-conforming* (definisi berdasarkan skema The Genderbeard Person Killerman (2011) dalam Laazulva, 2013; Oetomo, 2001: 24-27; Widayanti, 2009: 43). Definisi tersebut menunjukkan pada kita adanya batasan-batasan diskursus pada ruang dan waktu tertentu-di tengah masyarakat umum yang terikat dengan wacana dominan-lebih jauh mampu menampakkan waria mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda atau khas (subkultur).

Salah satu diantaranya adalah bahasa slang waria yang mereka gunakan sehari-hari dalam komunitas mereka. Bahasa waria dalam perspektif sosiolinguistik (2015), biasa disebut juga dengan bahasa prokem atau slang waria yang merupakan bahasa

percakapan (*colloquial*) dalam pergaulan sehari-hari dengan sesama waria lainnya, dimana bahasa tersebut bersifat rahasia dari anggota masyarakat umum karena bentuk katanya yang mendapatkan variasi sehingga makna yang sebenarnya tidak terlihat (Larno, 2015).

Bahasa waria juga menjadi *Speech community* yang membentuk identitas budaya waria karena melalui bahasa tersebut keberagaman identitas individu dalam kelompok waria dapat terikat, serta nilai-nilai budaya waria dapat disosialisasikan dan kemudian diinternalisasi oleh anggota waria (Widayanti, 2009: 62-63).

Identitas merupakan representasi untuk menunjukkan jati diri seseorang dalam masyarakat dan untuk kemudian mendapatkan pengakuan dari masyarakat agar seseorang bisa diterima keberadaannya. Bagi Giddens (1991), identitas diri terbentuk oleh kemampuan untuk melanggengkan narasi tentang diri, sehingga membentuk perasaan

terus-menerus tentang adanya kontinuitas biografis (Barker, 2005: 175).

Bahasa waria digunakan sebagai media komunikasi untuk berinteraksi, sekaligus media pemahaman mengenai nilai-nilai dan norma hidup sehari-hari waria sehingga bahasa waria yang digunakan bersifat rahasia dan hanya bisa dipahami mereka sendiri. Terjalannya komunikasi dan sosialisasi dalam interaksi yang dilakukan sesama waria tersebut menjadikan lahirnya representasi jati diri mereka sendiri yang untuk kemudian dilanggengkan oleh narasi tentang diri mereka masing-masing. Penggunaan bahasa waria juga merupakan bentuk resistensi atau perlawanan karena perasaan dimarginalkan sebagai efek yang dihasilkan kekuasaan dalam wacana heteronormatif. Sebagai contoh adalah *lekong asli* untuk menyebut pria yang dinafkahi atau menjadi objek semburit waria, *sakinah* untuk menyebut orang dengan homoseksual, dimana oleh masyarakat *mainstream* disebut

“sakit”, dan sebagainya (Oetomo, 2001: 68-70).

Konsep identitas diri menurut Giddens juga tak jauh berbeda dengan gagasan identitas dalam perspektif sosiolinguistik, yakni bisa diketahui dengan dua cara berikut (Thomas & Wareing, 2007: 227-344): *pertama* jenis-jenis representasi penutur dalam menunjukkan siapa sebenarnya kelompok mereka, antara lain ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap norma-norma linguistik kelompoknya. Anggapan diri sebagai anggota kelompok sosial atau masyarakat tertentu dengan penggunaan konvensi-konvensi atau kebiasaan linguistik dari kelompok tersebut. Bukan hanya terkait dengan kata-kata apa yang digunakan, melainkan juga cara bagaimana menggunakan dan mengkomunikasikannya lewat pembicaraan atau percakapan. *Kedua*, representasi kelompok luar terhadap kelompok dalam tersebut dan varian atau variasi bahasa yang digunakan.

Sebagai *speech community*, waria merepresentasikan bahasa

waria sebagai bahasa mereka dengan mematuhi pola bahasa waria yang sudah dikonvensi bersama tanpa tertulis, dan mendapatkan manfaat atau fungsi dari hal tersebut, serta adanya representasi individu atau kelompok di luar waria yang bisa dilihat dari tanggapan mereka terhadap varian bahasa waria yang digunakan, bahwa iya bahasa tersebut dikonvensi sebagai bahasa khas waria.

Tidak ada pola atau kaidah tetap yang dijadikan acuan baku dalam pembentukan bahasa waria. Bahasa waria secara spontan (arbiter) tercipta begitu saja dengan variasi kosakatanya, serta bersifat bebas untuk diciptakan dan digunakan oleh waria manapun. Variasi ini yang kemudian bisa dikaji dalam ilmu kebahasaan sebagai pola atau kaidah yang biasanya dipakai waria untuk mennciptakan kosakata bahasa waria baru. Bahasa waria di Yogyakarta berdasarkan variasi perubahannya mengalami perkembangan dalam tiga jenis, yakni (1) Bahasa waria Belanda,

merupakan bahasa waria yang digunakan oleh waria yang pernah mengalami masa Hindia-Belanda dimana kosakata yang diplesetkan atau mengalami perubahan bentuk (pengurangan atau penambahan) berasal dari kosakata bahasa Belanda (Ratri, 2017), (2) bahasa waria daerah atau lokal, bahasa waria yang sifatnya kedaerahan dan atau kosakata yang divariasikan atau mengalami perubahan bentuk (pengurangan atau penambahan) berasal dari kosakata bahasa daerah tempat tinggal waria, (3) bahasa waria nasional, ialah bahasa waria yang digunakan oleh sebagian besar waria Indonesia dimana kosakata yang diplesetkan atau mengalami perubahan bentuk (pengurangan atau penambahan) berasal dari kosakata bahasa Indonesia (Jumiati & Inramini, 2015: 374).

Adapun manfaat dan atau fungsi bahasa waria antara lain: menyegarkan suasana, menciptakan humor, menyindir atau mengejek, mengintimkan atau mengakrabkan hubungan, merahasiakan informasi,

menghaluskan sesuatu yang dianggap vulgar atau tabu, mengungkapkan sikap dan perasaan hati, dan menunjukkan keanggotaan seseorang terhadap kelompok sosial tertentu (Crysal dalam Larno, 2015: 16-17).

Representasi individu atau kelompok di luar waria yang mengakui dan mengkonvensi bahwa iya bahasa tersebut sebagai bahasa khas waria bisa dilihat dari tanggapan atau respon masyarakat berupa gejala atau fenomena penyatuan (konfergensi) bahasa waria dengan individu di luar kelompok mereka (Thomas dan Wareing, 2007). Yakni digunakannya bahasa waria sebagai bahasa gaul (berinteraksi dengan waria) karena dianggap unik dan lucu sebagai bentuk penerimaan terhadap entitas subjek waria, maupun menggunakan bahasa waria untuk mengolok-olok karena masih adanya anggapan waria adalah objek yang menyimpang dari diskursus heteronormatif.

KESIMPULAN

Pada hakikatnya manusia diciptakan dalam keberagaman yang mampu membentuk jati diri atau identitas, baik yang terdapat dalam diri maupun yang berasal dari luar diri. Dalam konteks seksualitas masyarakat Indonesia saat ini sebagian besar masih memahami identitas dengan asumsi-asumsi esensialisme. Identitas seksual dipahami sebagai sesuatu yang universal dan mutlak, bahwa kemudian hanya ada dua dikotomi identitas: perempuan dan laki-laki (*binary thinking*), yangmana tersusun atas kesesuaian seks atau jenis kelamin, peran (gender), dan orientasi seksual yang bertujuan pro-kreasi (melahirkan keturunan). Pemahaman tersebut oleh masyarakat kita dijadikan pedoman, asas atau ideologi dalam menjalani kehidupan (heteronormavitas), serta landasan untuk memahami dan mengobjektivasi individu atau kelompok lain menjadi sebuah entitas subjek. Waria dalam hal tersebut selama ini dianggap sebagai individu atau kelompok yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan nilai-

nilai heteronormatif dan *binary thinking* yang telah dikonstruksi masyarakat, sehingga menjadi waria kemudian adalah sebuah penyakit, penyimpangan, berdosa, dilaknat dan lazim kiranya dimarginalkan ataupun ditempatkan sebagai subaltern.

Jika dilihat dari perpektif kritis dalam asumsi anti-esensialisme, waria merupakan entitas subjek yang patut dimanusiakan. Ini dikarenakan identitas merupakan hasil dari konstruksi diskursif yang berubah maknanya menurut ruang, waktu, dan pemakaiannya. Bahwa kemudian identitas waria yang makna subjeknya terbentuk berdasar seksualitas dapat berubah, ditemukan, dibentuk dan atau direpresentasikan oleh bahasa dalam suatu wacana atau diskursus melalui hubungan atau relasi timbal balik pengetahuan dan kekuasaan.

Ketidaksesuaian waria dengan konstruksi heteronormatif dan pemikiran biner laki-laki perempuan menjadikan waria sebagai gender ketiga yang mempunyai kebudayaan sendiri yang khas di Indonesia. Identitas tersebut tersusun oleh serangkaian konsep dan pemahaman waria melalui penggunaan bahasa dan

delimitasi atau batasan struktur diskursif berupa identitas seksnya laki-laki, tapi gendernya perempuan, orientasi seksualnya homoseksual (sesama jenis kelamin laki-laki), serta praktik sosial yang menjadi praktik diskursif: praktik penamaan dan sapaan, perubahan bentuk tubuh, cara berperilaku, cara berdandan, bidang pekerjaan yang waria tekuni (pekerja seks komersial di *cebongan*, pengamen di jalanan, dunia hiburan malam, *fashion* dan kecantikan).

Praktik diskursif yang diproduksi dan dimapankan oleh waria tersebut untuk mencapai tujuan sebagai sarana pemuasan hasrat yang terdapat dalam diri waria sebagai manusia, yakni untuk memperoleh haknya sebagai manusia, untuk memperoleh kesenangan (*pleasure*), dan kebenaran tentang diri. Semua diskursus-diskursus tersebut kemudian oleh penulis dilihat telah direpresentasikan dalam praktik sosial pemakaian bahasa waria yang hanya bisa dimengerti oleh kelompok mereka sendiri. Dengan kata lain, bahasa waria berperan penting sebagai bahasa komunitas (*speech community*) yang merepresentasikan

batasan-batasan diskursus tersebut pada ruang masyarakat umum sekarang yang terikat dengan wacana dominan heteronormatif, serta menjadi salah satu simbol yang menunjukkan entitas identitas waria sebagai subkultur, dimana waria mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda atau khas dari kebudayaan arus utama masyarakat mayoritas Indonesia.

Saran

Penulis berharap pembaca mampu mengubah cara pandang untuk dapat minimal mengetahui dan maksimal menerima kehadiran waria sebagai suatu entitas subjek yang terbentuk dari praktik diskursif untuk lebih dimanusiakan. Selain itu, karena keterbatasan penulis sehingga penulisan ini jauh dari sempurna, maka diharapkan juga bisa dilakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam lagi mengenai bahasa waria serta fenomena adanya waria yang keluar dari batasan-batasan struktur diskursus waria sebagai gender ketiga yang dominan dengan ekspresi gender *non-conforming* dari perspektif kajian Sosiologi.

Daftar Pustaka

- Ali, Makrus. (2016, September 23-24). Mewartakan Liyan: Media, Homoseksual Dan Reproduksi Homophobia Dalam Perspektif Historis. *Konferensi Internasional Feminisme: Persilangan Identitas, Agensi, dan Politik (20 Tahun Jurnal Perempuan)*, hal. 842.
- Alimi, Moh. Yasir. (2004). *Dekonstruksi Seksualitas Postkolonial: Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Barker, Chris. (2005). *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks*. Yogyakarta: Lkis.
- Foucault, Michel. (2000). *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jumiati, S., & Inramini. (2015). Jargon Bahasa waria suatu kajian pragmatik. *Jurnal Pendidikan KONFIKS* Vo. 2, No.2. Universitas Muhammadiyah Makassar. 133-142.
- Koeswinarno. (2004). *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta : LkiS.
- Laazulva, I. (2013). *Menguak Stigma, Diskriminasi dan Kekerasan pada LGBT di Indonesia*. Jakarta: Arus Pelangi.
- Larno. (2015). *Slang Waria* Yogyakarta: *Kajian Sociolinguistik*. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada.
- Nadia, Zunly. (2005). *Waria; Laknat atau Kodrat?* Yogyakarta: Pustaka Marwa.

- Oetomo, Dede. (2001). *Memberi Suara Pada Yang Bisu*. Yogyakarta: Galang Press.
- Rafiek, Muhammad. (2013). Ragam Bahasa Waria dalam Sinetron. *Jurnal Bahasa dan Sastra Vol. 3, No. 1 FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*.
- Respa, Chindy. (2014). *Diskursus Waria dalam Pembentukan The Third Gender di Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Widayanti, Titik. (2009). *Politik Subaltern: Pergulatan Identitas Waria*. Yogyakarta: Research Center for Politic and Government Program Studi Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.